KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT BADAN USAHA

Nomor SOP	:	AHU-31.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	16 Desember 2024
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	24 Februari 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	PEMBERIAN DATA DAN INFORMASI BADAN USAHA SECARA ONLINE

DASAR HUKUM :	
1	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2	Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
3	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
6	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
7	Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
8	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum
9	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
10	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi
11	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan
12	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
13	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata
14	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha
2. Memahami ketentuan permohonan pemberian data dan informasi badan usaha
3. Memahami akses SABH www.ahu.go.id
4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Hukum

15	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan	
16	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan	
KETERKAITAN		**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1	SOP Teknologi Informasi	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Data Badan Hukum Badan Usaha 3. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan terkait 4. Jaringan internet
PERINGATAN :		**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN DATA DAN INFORMASI BADAN USAHA SECARA ONLINE

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon	SABH	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masuk ke laman www.ahu.go.id, dan membayar PNBP. Memilih "pencarian atau unduh data korporasi secara online" atau "informasi tentang data korporasi".			Pembayaran PNBP	*Real time*	Nomor voucher	
2	Melakukan pencarian data di dalam sistem. Jika data dan informasi ditemukan, proses lanjut. Jika data dan informasi tidak ditemukan / informasi tidak dapat diunduh, maka proses selesai.				*Real time*	Data dan informasi ditemukan/ tidak ditemukan	Dalam hal data dan informasi tidak ditemukan/ tidak dapat diunduh, Pemohon bersurat secara manual ke DitJen AHU
3	Menerima data dan informasi yang dicari melalui email				*Real time*	Data dan informasi diterima melalui email	